

Dinamika Perumusan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan

Syaiful Hasan¹, Wahyu Satriyo Pamungkas², Dani Wahyu Pratama³, Muhammad Mughni Labib⁴

¹ Universitas Lumajang, Indonesia; syaifulhasan789@gmail.com

² Universitas Lumajang, Indonesia; wahyusatriyo31p@gmail.com

³ Universitas Lumajang, Indonesia; daniwahyupratama680@gmail.com

⁴ Universitas Lumajang, Indonesia; denlabib77@gmail.com

IDAROTUNA: Jurnal Administrative Science

Vol 6 No 2 November 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2.174>

Received: November 06, 2025

Accepted: November 19, 2025

Published: November 30, 2025

Publisher's Note: Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2025 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Road infrastructure development in villages is a form of public policy that plays a strategic role in improving accessibility, economic growth, and the welfare of rural communities. However, the process of formulating village road development policies is inseparable from various dynamics involving the interests of actors, limited resources, and the socio-political conditions of the local community. This study aims to analyze the dynamics of public policy formulation in road infrastructure development in villages. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through literature studies, observation, and documentation. The results of the discussion indicate that the dynamics of policy formulation are influenced by the process of identifying community needs, public participation in village deliberations, the role of the village government and the Village Consultative Body, and the influence of regional and central government policies. In addition, budget limitations and differences in interests among residents are major challenges in determining development priorities. The conclusion of this discussion confirms that participatory, transparent, and accountable formulation of village road development policies will produce more targeted and sustainable policies, thereby encouraging equitable village development.

Keywords: *Formulation Dynamics, Public Policy, Road Infrastructure*

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan di desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Jalan desa berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, serta dalam mendorong mobilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur jalan desa juga menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Penguatan peran desa semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi desa untuk menyusun kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut juga membawa tantangan dalam proses perumusan kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan aktor, dan dinamika sosial-politik lokal.

Dinamika Perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa krai merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, kelompok kepentingan, serta pemerintah daerah. Interaksi antaraktor tersebut memengaruhi tahapan perumusan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, proses perumusan kebijakan tidak selalu berjalan secara rasional dan linear, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, tingkat partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, serta kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek implementasi dan dampak pembangunan infrastruktur jalan desa, sementara kajian yang

secara khusus mengulas dinamika perumusan kebijakan publik di tingkat desa masih relatif terbatas. Padahal, tahap perumusan kebijakan merupakan fase krusial yang menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan. Kelemahan dalam proses perumusan kebijakan berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang efektif, dan berisiko menimbulkan konflik sosial di tingkat lokal.

Selain itu, mekanisme perencanaan partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) belum sepenuhnya berjalan optimal dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara inklusif. Partisipasi masyarakat sering kali bersifat formalitas, sementara keputusan strategis tetap didominasi oleh aktor-aktor tertentu. Keterbatasan anggaran, ketergantungan pada Dana Desa, serta belum optimalnya sinkronisasi antara kebijakan desa dan kebijakan pemerintah daerah juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana proses perumusan kebijakan berlangsung, aktor-aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Dengan memahami dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik di tingkat desa, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam memperbaiki proses perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

Pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa merupakan salah satu prioritas kebijakan publik yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi lokal, serta kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pembangunan tersebut sangat ditentukan oleh proses perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi sosial, politik, dan kelembagaan di tingkat lokal. Di Desa Krai,

pembangunan infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan, yang mengindikasikan adanya dinamika dan tantangan dalam proses perumusannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada proses perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Krai. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana tahapan dan mekanisme perumusan kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah desa bersama pemangku kepentingan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang memengaruhi proses perumusan kebijakan tersebut, baik yang bersumber dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Faktor-faktor tersebut diyakini memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Krai. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, perbedaan kepentingan antaraktor, maupun kelemahan koordinasi kelembagaan. Dengan memahami permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika perumusan kebijakan publik di tingkat desa. Tujuan Penelitian.

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di tingkat desa, khususnya di Desa Krai. Analisis ini mencakup tahapan perumusan kebijakan, aktor yang terlibat, serta mekanisme pengambilan keputusan yang diterapkan dalam konteks pemerintahan desa.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Krai, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan. Identifikasi faktor-faktor tersebut penting untuk memahami kondisi yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang dirumuskan.

Tujuan selanjutnya adalah menilai implikasi dinamika perumusan kebijakan terhadap kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Krai. Melalui penilaian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya perbaikan proses perumusan kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika, proses, dan interaksi aktor dalam perumusan kebijakan publik pembangunan infrastruktur jalan desa. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan fenomena penelitian secara sistematis dan faktual. Penelitian dilaksanakan di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang dipilih secara purposive karena desa tersebut melaksanakan program pembangunan jalan desa dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan. Waktu penelitian berlangsung selama 3–4 bulan, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan.

Fokus penelitian mencakup aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, proses perumusan kebijakan dari identifikasi masalah hingga penetapan, interaksi dan kepentingan antaraktor, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Informan ditentukan melalui purposive sampling, meliputi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pendamping desa, dan perwakilan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen resmi desa dan literatur pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi

sumber dan teknik. Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian dengan menjaga persetujuan dan kerahasiaan informan.

Diskusi

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan tertentu (Dunn, 2018). Kebijakan publik juga dipahami sebagai respons terhadap masalah publik melalui serangkaian pilihan yang mengandung unsur tindakan (Anderson, 2015).

Proses kebijakan publik umumnya dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu: Perumusan masalah (problem identification), Agenda setting, Perumusan kebijakan (policy formulation), Pengambilan keputusan (decision-making), Implementasi, Evaluasi kebijakan (policy evaluation) (Untuk fokus penelitian ini, yang paling utama adalah tahapan perumusan kebijakan — merancang alternatif solusi dan memilih yang paling tepat untuk dicapai.) Beberapa ahli seperti Easton (1965) melihat kebijakan sebagai sistem input-output, sementara Lasswell (1956) menekankan pada fungsi-fungsi nilai dalam pembuatan kebijakan. Masing-masing pendekatan membantu memahami efisiensi dan efektivitas proses kebijakan yang kompleks.

2. Dinamika Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa sosial-politik, melainkan merupakan arena interaksi berbagai aktor (public choice). Aktor tersebut termasuk birokrat, politisi, elite lokal, tokoh masyarakat, dan warga desa (Sabatier & Weible, 2014). Interaksi ini dipengaruhi oleh: Agenda politik, Kepentingan ekonomi, Nilai budaya masyarakat setempat. Teori Multiple Streams Framework (Kingdon, 1995) menjelaskan bahwa kebijakan akan muncul ketika tiga aliran — masalah, kebijakan, dan politik — bertemu pada jendela peluang.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan publik

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurut Arnstein (1969), skala partisipasi berkisar dari nonpartisipatif hingga pemberdayaan penuh masyarakat. Dalam pembangunan jalan desa, partisipasi masyarakat dapat berupa: Musyawarah desa (Musdes), Forum konsultasi publik, Kelompok kerja pembangunan (pokja) Partisipasi ini memengaruhi relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal (Putnam, 1993).

4. Insfratraktur Jalan Desa

Infrastruktur jalan desa memiliki peran strategis dalam Menghubungkan akses ekonomi (pasar, pertanian, pendidikan), Meningkatkan mobilitas masyarakat, Mendorong pembangunan lokal (World Bank, 2017). Jalan yang baik juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Tanpa infrastruktur jalan yang memadai, akses menuju fasilitas dasar seperti sekolah, pasar, rumah sakit, atau tempat kerja menjadi terbatas, yang dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan insfratraktur jalan di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang, merupakan salah satu prioritas pemerintah kabupaten lumajang dalam meningkatkan kualitas hisdup masyarakat di pedesaan. Kebijakan ini sangat penting karna jalan di desa krai berperan besar dalam meningkatkan aksesibilitas, perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Dinamika perumusan kebijakan diawali dengan proses identifikasi masalah, seperti kondisi jalan yang rusak, sulit dilalui saat musim hujan, atau tidak terhubung dengan pusat ekonomi dan layanan publik, Sehingga masyarakat desa krai sering mengeluh tentang keadaan ini. Pada tahap ini, aspirasi masyarakat desa krai menjadi faktor utama dalam penyusunan kebijakan. Aspirasi biasanya disampaikan melalui musyawarah desa (musdes), forum RT/RW, atau usulan dalam Musrenbang Desa. Perbedaan kepentingan dan prioritas

antarwarga sering menimbulkan dinamika dalam menentukan kebutuhan yang paling mendesak.

Perumusan kebijakan pembangunan jalan di desa krai melibatkan berbagai aktor: Pemerintah desa krai: Kepala desa 1 orang, Staf desa 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 orang, Pemerintah daerah lumajang 2 orang, Masyarakat desa krai 10 orang. Pemerintah desa berperan sebagai perumus utama kebijakan sementara BPD berfungsi sebagai pengawas dan penyalur aspirasi warga. Dinamika muncul ketika terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait lokasi, anggaran, atau skala pembangunan jalan.

Pada tahap ini, pemerintah desa krai bersama masyarakat dan pendamping desa menyusun beberapa opsi kebijakan seperti Perbaikan jalan tanah menjadi jalan rabat beton, Pengaspalan jalan desa. Pembangunan bertahap sesuai kemampuan anggaran. Setiap alternatif dianalisis dari sisi biaya, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian disahkan oleh Kepala Desa dan didukung oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan legitimasi ini, pembangunan jalan memiliki dasar hukum yang jelas.

Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses ini bersifat dinamis karena harus melalui pembahasan dan persetujuan berbagai pihak. Negosiasi, kompromi, dan penyesuaian rencana sering terjadi agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat desa krai.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Faktor Politik Berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, dan pengambilan keputusan. Kepentingan politik lokal Pembangunan jalan sering dipengaruhi oleh dukungan politik, misalnya wilayah pendukung pemimpin desa lebih diprioritaskan. Tekanan dan aspirasi kelompok masyarakat tertentu (tokoh adat, tokoh pemuda) dapat memengaruhi arah kebijakan melalui musyawarah.

Faktor sosial berkaitan dengan kondisi masyarakat dan dinamika sosial di desa. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jalan dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari. Partisipasi masyarakat Tingkat kehadiran dan keterlibatan warga dalam Musdes/Musrenbang memengaruhi keputusan kebijakan. Faktor Ekonomi menentukan kelayakan dan keberlanjutan pembangunan jalan. Ketersediaan anggaran Besarnya Dana Desa, APBDes, atau bantuan pemerintah daerah sangat menentukan skala pembangunan. Biaya pembangunan dan pemeliharaan Keterbatasan dana membuat desa harus memilih jenis jalan yang paling efisien. Faktor kelembagaan berkaitan dengan aturan, struktur organisasi, dan kapasitas aparatur desa. Kapasitas aparatur desa. Kemampuan perangkat desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran memengaruhi kualitas kebijakan. Koordinasi dengan pemerintah di atasnya. Sinkronisasi dengan kecamatan, kabupaten, atau provinsi sangat menentukan dukungan teknis dan pendanaan.

3. Kendala dan Tantangan dalam Perumusan Kebijakan

Keterbatasan dana desa dan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten lumajang menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan. Pemerintah desa krai harus menyesuaikan antara kebutuhan ideal dan kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini sering memicu perdebatan dalam menentukan prioritas pembangunan, apakah memperbaiki jalan utama desa atau jalan lingkungan yang lebih kecil namun dibutuhkan oleh sebagian warga.

Tingkat partisipasi masyarakat desa krai sangat memengaruhi dinamika kebijakan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar peluang kebijakan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nyata. Namun, kurangnya transparansi dalam proses perumusan dapat menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan penolakan dari warga terhadap hasil kebijakan pembangunan jalan.

Keterbatasan sumber daya manusia (SDA) dalam hal keahlian teknis (misalnya, teknik sipil atau perencanaan infrastruktur) dapat memengaruhi kualitas pembangunan jalan. Selain

itu, tidak jarang para pejabat di tingkat desa krai kurang memiliki pengetahuan mengenai cara-cara perencanaan infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan. Korupsi atau penyalahgunaan dana pembangunan sering kali terjadi dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di desa krai. Hal ini bisa mengarah pada kualitas proyek yang buruk atau bahkan tidak selesai sama sekali. Tidak jarang dana yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan desa diselewengkan, atau proyek yang dikerjakan hanya setengah hati. Proyek jalan bisa tidak sesuai dengan anggaran dan kualitas yang ditentukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pembangunan jalan desa krai tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga sosial dan politik. Kebijakan yang dianggap tidak adil atau tidak merata dapat memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah desa krai harus mampu mengelola dinamika sosial dan politik agar kebijakan pembangunan jalan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Dinamika perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa krai merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan serta aktor. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, dilanjutkan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, hingga penyesuaian dengan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Perbedaan kepentingan antarwarga, keterbatasan anggaran, serta kemampuan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkeadilan. Keberhasilan perumusan kebijakan pembangunan jalan desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah desa, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik dan melakukan kompromi.

Kebijakan yang dirumuskan secara partisipatif dan akuntabel cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas, perekonomian, dan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan desa yang berkelanjutan dan merata.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai dinamika perumusan kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan ke depan.

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan. Partisipasi yang inklusif akan membantu memastikan bahwa kebijakan pembangunan jalan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat desa krai.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan jalan desa harus terus diperkuat. Pemerintah desa krai diharapkan dapat membuka akses informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Pemerintah desa perlu menetapkan skala prioritas yang jelas dan objektif dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan ekonomi yang paling luas. Hal ini penting mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya yang tersedia.
4. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar perumusan kebijakan pembangunan jalan dapat dilakukan secara lebih profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya perlu ditingkatkan agar kebijakan pembangunan jalan desa krai dapat berjalan selaras, efektif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fischer, F. (2003). *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, & Nugroho, R. (2011). *Manajemen Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Zahariadis, N. (2007). *The Multiple Streams Framework: Structure, Limitations, Prospects*. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (hal. 65–92). Westview Press.